



**LAPORAN
RENCANA AKSI TAHUN (RAT)
PENANGGULANGAN KEMISKINAN
KABUPATEN ROTE NDAO
TAHUN 2024**

**BAPELITBANGDA
KABUPATEN ROTE NDAO
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Dalam rangka meningkatkan efektifitas dan percepatan upaya penanggulangan kemiskinan, Pemerintah Kabupaten Rote Ndao telah menerbitkan Surat Keputusan Bupati, Nomor 276/KEP/HK/Tahun 2021 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024-2025. Hal ini selaras dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (TKPK).

Laporan Rencana Aksi Tahunan (RAT) ini menjelaskan tentang strategi penanggulangan kemiskinan Kabupaten Rote Ndao yang mencakup tiga hal *Pertama*, kelembagaan penanggulangan kemiskinan. *Kedua*, gambaran kemiskinan Kabupaten Rote Ndao. *Ketiga*, capaian analisis kemiskinan dan program kegiatan penanggulangan kemiskinan Tahun 2024.

Terlaksananya program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan yang direncanakan secara terintegrasi tidak terlepas dari peran dan partisipasi peran pemerintah dan seluruh *stakeholder* serta elemen masyarakat Kabupaten Rote Ndao, oleh karena itu koordinator TKPK Kabupaten Rote Ndao menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya pada semua pihak yang terlibat pada kegiatan penanggulangan kemiskinan ini. Laporan ini merupakan salah satu tolok ukur dalam upaya implementasi program kegiatan penanggulangan kemiskinan yang merupakan salah satu program prioritas pemerintah Kabupaten Rote Ndao.

Ba'a ~ Juli 2024
Kepala Bapelitbangda
Kabupaten Rote Ndao

Diana A. Bullu, SE
Pembina Tk. I
NIP. 19801209 200904 2 005

DAFTAR ISI

	Hal.
KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
BAB I PENDAHULUAN	3
1.1. Latar Belakang	3
1.2. Maksud dan Tujuan	5
1.3. Landasan Hukum	5
1.4. Sistematika Penulisan	7
BAB II KELEMBAGAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN	8
2.1. Kelembagaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK)	8
2.2. Koordinasi Kelembagaan Penanggulangan Kemiskinan	12
2.3. Monitoring dan Evaluasi	13
BAB III CAPAIAN KINERJA PENANGGULANGAN KEMISKINAN	15
3.1. Persentase Penduduk Miskin	15
3.2. Garis Kemiskinan	18
3.3. Indeks Kedalaman Kemiskinan	21
3.4. Indeks Keparahan Kemiskinan	23
3.5. Program Penanggulangan Kemiskinan	29
BAB IV PENUTUP	33
4.1. Kesimpulan	33
4.2. Saran	33

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan merupakan problematika kompleks dalam pembangunan yang mencakup berbagai dimensi seperti sosial, ekonomi, budaya, politik serta dimensi ruang dan waktu. Dalam **Perspektif Sosial**, penduduk miskin kurang mendapat perhatian dari lingkungan dan pranata sosial karena lemahnya nilai kepedulian. **Perspektif Ekonomi**, penduduk miskin kesulitan memenuhi kebutuhan karena rendahnya pendapatan. **Perspektif Kultural** muncul dengan stereotip bahwa penduduk miskin itu cenderung malas, mudah menyerah pada nasib dan kurang memiliki etos kerja. Pada tataran yang lebih luas efek domino kemiskinan struktural terhadap kemiskinan kultural membuat penduduk miskin menjadi apatis, pasrah, dan berpandangan jika sesuatu yang terjadi adalah takdir. **Perspektif Politik**, penduduk miskin sebagai kelompok periferi yang diabaikan dalam pengambilan keputusan menyangkut keberlanjutan hidupnya. **Perspektif Ruang dan Waktu** dapat digambarkan dari keterisolasian yang pada akhirnya berdampak pada perbedaan aksesibilitas terhadap peluang dan kesempatan ekonomi. Asumsi yang dibangun ini berkorelasi terhadap ketersediaan sarana dan prasarana sosial ekonomi yang berbeda secara signifikan yang selanjutnya akan berpengaruh terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat. (Lewis, 1966 & Chamber, 1985).

Strategi memerangi kemiskinan yang dikemukakan oleh Gunnar Adler Karlsson yang dikutip Andre Bayo Ala (1981) yaitu: *Pertama*, strategi jangka pendek yaitu **memindahkan** sumber daya kepada kaum miskin dalam jumlah yang memadai. Perbaikan keadaan kemiskinan dalam jangka pendek diantaranya menciptakan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan dan memperbaiki distribusinya. *Kedua*, Strategi jangka panjang dengan

menumbuhkan **swadaya** setempat, perbaikan dalam jangka panjang dengan memperbaiki dan memenuhi harkat hidup secara individual dan sosial yang bermartabat. Oleh karena itu, strategi pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan oleh Pemerintah dibagi menjadi dua bagian besar yaitu: *Pertama*, melindungi keluarga dan kelompok masyarakat yang mengalami kemiskinan sementara. *Kedua*, membantu masyarakat yang mengalami kemiskinan kronis dengan memberdayakan dan mencegah terjadinya kemiskinan baru.

Dalam upaya mencapai tujuan penanggulangan kemiskinan yang terintegrasi, maka perlu menyusun Rencana Aksi Tahunan (RAT) Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2024 agar kita dapat mengidentifikasi permasalahan-permasalahan kemiskinan di Rote Ndao dan mencari solusi dalam penanggulangan kemiskinan. Laporan ini juga merupakan *breakdown* dari dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2025-2026, secara khusus berkaitan dengan program-program, indikasi kegiatan dan sub kegiatan dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Rote Ndao.

Dalam rangka sinkronisasi dan upaya mewujudkan sinergitas pelaksanaan program kegiatan melalui Laporan Rencana Aksi Tahunan (RAT) Kemiskinan Daerah Tahun 2024, maka dibentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024-2025, sesuai Surat Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor: /KEP/HK/2024. Tugas Tim adalah melakukan koordinasi perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Rote Ndao.

TKPK Kabupaten Rote Ndao diharapkan mampu menjembatani setiap Satuan Kerja di lingkungannya untuk konsisten mengimplementasikan program kegiatan yang berbasis pada penanggulangan kemiskinan sehingga target penurunan angka kemiskinan yang telah ditetapkan didalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2026 dapat tercapai.

1.2 Maksud dan Tujuan

Dokumen Rencana Aksi Tahunan Kemiskinan Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024, disusun dengan maksud:

1. Mengkaji strategi kelembagaan dan koordinasi serta monitoring dan evaluasi dalam penanggulangan kemiskinan;
2. Menguraikan dan menganalisis capaian kinerja penanggulangan kemiskinan serta menjabarkan program penanggulangan kemiskinan secara terintegrasi yang tersebar di beberapa perangkat daerah;

Adapun tujuan penyusunan Rencana Aksi Tahunan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024 (RAT) yaitu:

1. Sebagai bahan analisa dan konsolidasi internal Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Rote Ndao;
2. Sebagai bahan evaluasi pelaksanaan dan perencanaan tindak lanjut penanggulangan kemiskinan Kabupaten Rote Ndao;

1.3 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor I Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang program percepatan penanggulangan kemiskinan;
7. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten / Kota;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Kemiskinan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024;
12. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 93 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024
13. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2026
14. Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor 322.a/KEP/HK/2021 tentang Kriteria Penerima Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dalam Rangka Mengatasi Risiko Sosial.
15. Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor 267 /KEP/HK/2021 tentang Tim

Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Rote Ndao Tahun 2021-2024;

1.4 Sistematika Penulisan

Laporan Rencana Aksi Tahunan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPK) Kabupaten Rote Ndao tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Maksud dan Tujuan
- 1.3. Landasan Hukum
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II KELEMBAGAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

- 2.1. Kelembagaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK)
- 2.2. Koordinasi Kelembagaan Penanggulangan Kemiskinan
- 2.3. Monitoring dan Evaluasi

BAB III CAPAIAN KINERJA PENANGGULANGAN KEMISKINAN

- 3.1. Presentase Penduduk Miskin
- 3.2. Garis Kemiskinan
- 3.3. Indeks Kedalaman Kemiskinan
- 3.4. Indeks Keparahan kemiskinan
- 3.5. Program Penanggulangan Kemiskinan

BAB IV PENUTUP

- 4.1. Kesimpulan
- 4.2. Saran

BAB II

KELEMBAGAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

2.1 Kelembagaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan(TKPK) Kabupaten Rote Ndao

Banyak pakar memberi definisi tentang koordinasi salah satunya Terry dalam (Syafiie, 2009): Koordinasi adalah sinkronisasi yang teratur (*orderly synchronization*) dari usaha-usaha (*effort*) untuk menciptakan pengaturan waktu (*timing*) dan terpimpin (*directing*), dalam hasil pelaksanaan yang harmonis (*harmonious*) dan bersatu untuk menghasilkan tujuan yang telah ditetapkan (*stated objectives*). Sedangkan Koordinasi dalam pemerintahan menurut (Syafrudin, 2003) adalah “suatu proses rangkaian kegiatan menghubungi, bertujuan untuk menyerasikan tiap langkah dan kegiatan dalam organisasi agar tercapai gerak yang cepat untuk mencapai sasaran dan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan”. Koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dilangsungkan secara horizontal dan vertikal di berbagai sektor termasuk dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan.

Strategi Penanggulangan kemiskinan daerah dijabarkan ke dalam arah kebijakan dengan indikator yang terukur. Selanjutnya arah kebijakan tersebut diimplementasikan dalam program/kegiatan pada setiap Perangkat Daerah khususnya yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur dasar, pembangunan pendidikan, ketenagakerjaan, peningkatan dan pelayanan kesehatan, peternakan, pertanian, perikanan, sosial, dan pemberdayaan masyarakat. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Presiden No. 15 tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan serta Permendagri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi, Kabupaten dan Kota, khususnya pada pasal 11 yang mengatur Tugas dan fungsi TKPKD Kabupaten.

TKPK Kabupaten dalam melaksanakan tugas melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten, menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pengkoordinasian penyusunan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten sebagai dasar penyusunan RPD Kabupaten di bidang penanggulangan kemiskinan;
- 2) Pengkoordinasian Perangkat Daerah atau gabungan Perangkat Daerah bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rencana strategis Perangkat Daerah;
- 3) Pengkoordinasian Perangkat Daerah atau gabungan Perangkat Daerah bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rancangan RKPD;
- 4) Pengkoordinasian Perangkat Daerah atau gabungan Perangkat Daerah bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rencana kerja Perangkat Daerah; dan
- 5) Pengkoordinasian terhadap evaluasi pelaksanaan perumusan dokumen rencana pembangunan daerah bidang penanggulangan kemiskinan.

TKPK Kabupaten dalam melaksanakan tugas mengendalikan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di kabupaten, menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pengendalian, Pemantauan, supervisi dan tindak lanjut terhadap pencapaian tujuan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan agar sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
- 2) Pengendalian pemantauan pelaksanaan kelompok program penanggulangan kemiskinan oleh Perangkat Daerah yang meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi;
- 3) Penyusunan hasil pemantauan pelaksanaan program dan atau kegiatan program penanggulangan kemiskinan secara periodik;
- 4) Pengendalian evaluasi pelaksanaan program dan atau kegiatan penanggulangan kemiskinan;

- 5) Pengendalian penanganan pengaduan masyarakat bidang penanggulangan kemiskinan; dan
- 6) Penyiapan laporan pelaksanaan dan pencapaian program penanggulangan kemiskinan kepada Bupati dan TKPK Provinsi.

Koordinasi program – program yang terkait dengan penanggulangan kemiskinan ini merupakan tugas dari Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Rote Ndao. Dikukuhkan dengan Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor 267/KEP/HK/Tahun 2021, tim ini terdiri dari unsur aparatur Perangkat Daerah yang terkait dengan Program Penanggulangan Kemiskinan, Masyarakat dan unsur organisasi sosial kemasyarakatan.

Kelembagaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Rote Ndao terdiri dari:

1. Penanggung Jawab : Penjabat Bupati Rote Ndao
2. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Rote Ndao
3. Wakil Ketua I : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda. Kabupaten Rote Ndao
4. Wakil Ketua II : Asisten Administrasi Umum Setda. Kabupaten Rote Ndao
5. Sekretaris : Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Rote Ndao
6. Wakil Sekretaris I : Kepala Dinas Sosial Kabupaten Rote Ndao
7. Wakil Sekretaris II : Kepala DPMD Kabupaten Rote Ndao
8. Wakil Sekretaris III : Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Rote Ndao

Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Rote Ndao dibantu oleh Sekretariat dan Kelompok Program sebagai berikut:

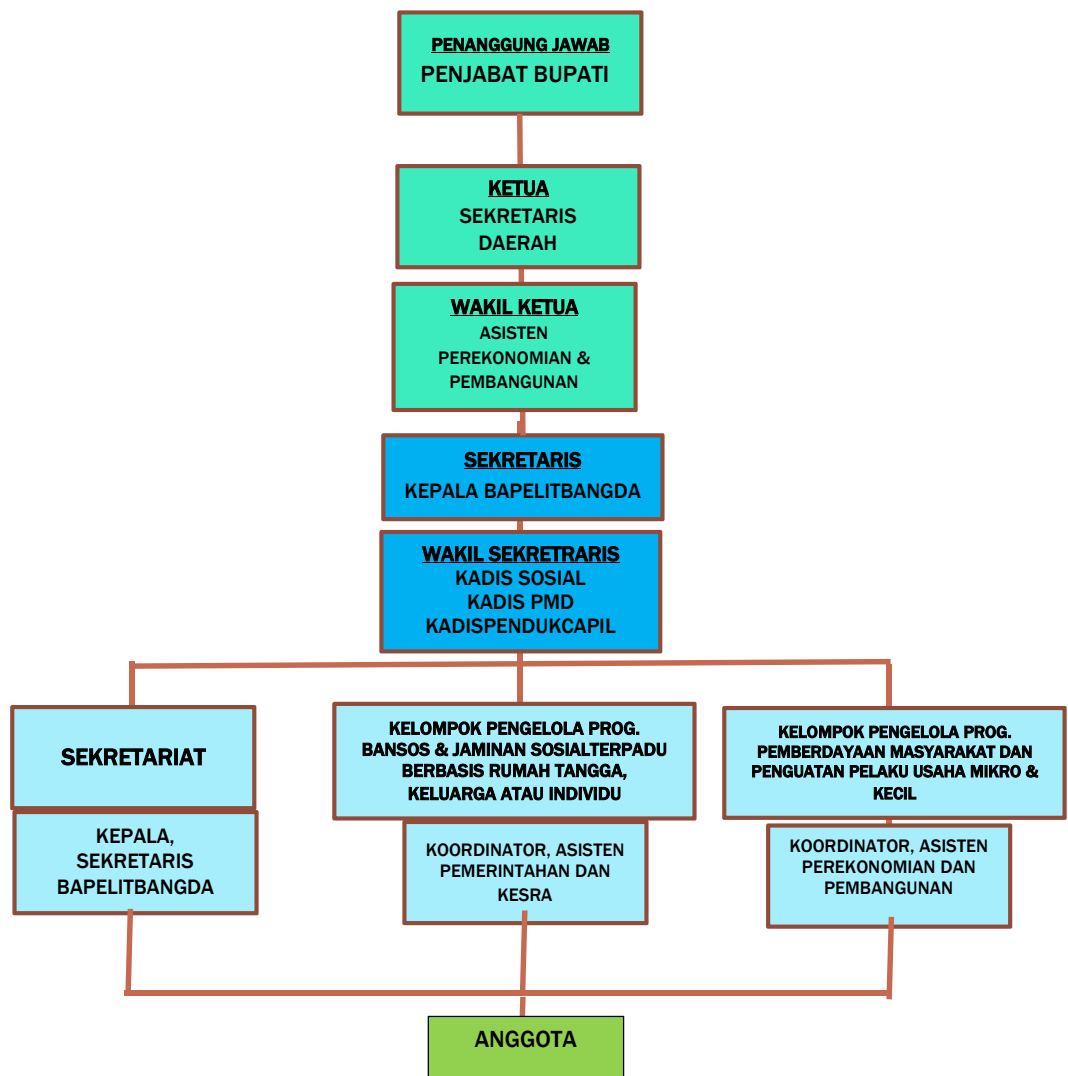
1. Sekretariat
2. Kelompok Pengelola Program
 - a) Kelompok Pengelola Program Bantuan Sosial dan Jaminan Sosial Terpadu Berbasis Rumah Tangga, Keluarga Atau Individu.

- b) Kelompok pengelola program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil.

Struktur Organisasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Rote Ndao disajikan pada gambar berikut:

Gambar 2.1

Struktur Organisasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK)
Kabupaten Rote Ndao



Permasalahan Penanggulangan Kemiskinan terutama berkaitan dengan validasi data kemiskinan, baik program Penanggulangan Kemiskinan di Desil I

yaitu program perlindungan sosial (Rastra, PKH, Jamkesmas/Jamkesda, dan program lainnya) Program Desil II, yaitu Program Pemberdayaan (Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan KB, LAKAMOLA ANANSIO dll) serta Program Pro Rakyat Lainnya seperti Bantuan Perumahan (ALADIN), Bantuan Ternak dan Pemberdayaan Koperasi-UMKM untuk masyarakat pada desil III dan IV.

2.2 Koordinasi Kelembagaan Penanggulangan Kemiskinan

Tugas pokok dari TKPK Kabupaten Rote Ndao adalah melakukan koordinasi perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan terhadap pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan pada tingkat provinsi. Sesuai dengan tugas pokoknya maka TKPK Kabupaten Rote Ndao telah melakukan beberapa kegiatan koordinasi lintas sektor dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Rote Ndao.

Selain itu kegiatan-kegiatan koordinasi ini penting untuk sinkronisasi program penanggulangan kemiskinan dan memastikan tidak adanya tumpang tindih antar program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan lintas sektor. Kegiatan-kegiatan koordinasi yang dilakukan oleh TKPK Kabupaten telah melibatkan berbagai pihak lintas sektor termasuk Tim TNP2K, lembaga sosial kemasyarakatan, NGO, lembaga keagamaan, dan Perangkat daerah terkait. Kegiatan-kegiatan yang bersifat koordinasi ini penting dilakukan untuk membangun kesepahaman antar sektor yang terlibat dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Rote Ndao.

Kegiatan-kegiatan koordinasi yang dilakukan oleh TKPK Kabupaten Rote Ndao tahun 2024 ini yaitu Rapat Persiapan Implementasi percepatan penghapusan Kemiskinan Ekstrem 2024 dan serta penetapan program prioritas yang menjadi fokus percepatan penghapusan Kemiskinan Ekstrem, Selain itu juga terdapat beberapa kegiatan- kegiatan yang merupakan agenda tahunan dari TKPK Kabupaten Rote Ndao yaitu Penyusunan Dokumen Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD)

Kabupaten Rote Ndao tahun 2024, dan Penyusunan Rencana Aksi Tahunan (RAT) Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Rote Ndao.

2.3 Monitoring dan Evaluasi

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap program penanggulangan kemiskinan dapat dilakukan dengan memperhatikan capaian indikator program dan kegiatan dengan tahapan sebagai berikut : *Pertama*, Tahapan Perencanaan berfokus pada masukan/*input* program (anggaran, SDM, dan rencana kerja); *Kedua*, Tahapan Pelaksanaan berfokus pada Program dan Kegiatan/*process*(pencapaian sasaran, penerapan prosedur dan regulasi); dan *Ketiga*, Tahapan Pasca Pelaksanaan berfokus pada hasil dan dampak program (*output, outcome dan impact*). Pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi program penanggulangan kemiskinan ini minimal dilaksanakan setiap 3 bulan sekali. Kegiatan monitoring dan evaluasi program penanggulangan kemiskinan tersebut dapat dilakukan terhadap :

- a. Program-program penanggulangan kemiskinan yang ada di setiap Perangkat Daerah;
- b. Evaluasi terhadap *output* program-program penanggulangan kemiskinan yang ada di setiap bidang Perangkat Daerah;
- c. Evaluasi terhadap capaian indikator (*outcome*) kemiskinan.

Metode-metode yang dapat digunakan untuk melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan antara lain adalah:

- a. Metode Survei yaitu dengan melakukan pengumpulan data dan informasi dari responden yang diperoleh dari sampel yang representatif.
- b. Metode partisipatif yaitu metode untuk mengumpulkan data dan informasi dengan cara terlibat langsung dalam jangka waktu tertentu.
- c. Metode analisis anggaran yaitu dengan menganalisis item-item belanja program dan membandingkan dengan rencana awal.

- d. Metode kunjungan lapangan yaitu melakukan kunjungan ke lapangan untuk memperoleh informasi dari penerima program dan stakeholder lainnya yang terkait.

BAB III

CAPAIAN KINERJA PENANGGULANGAN KEMISKINAN

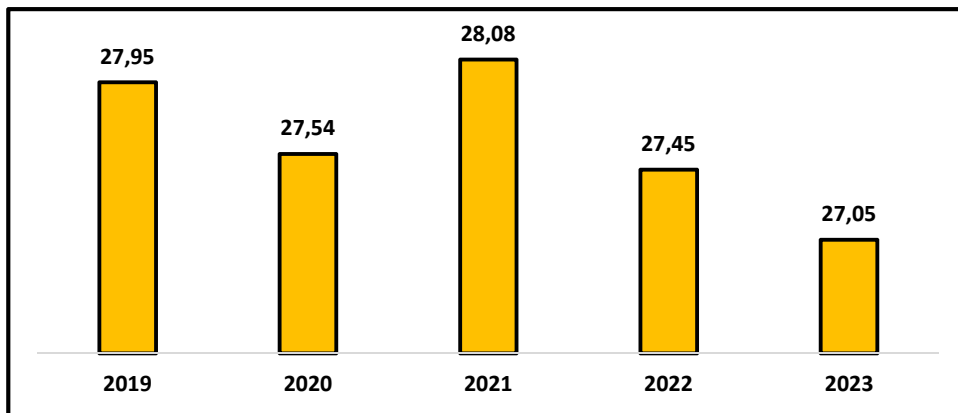
3.1 Persentase Penduduk Miskin

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan **di bawah garis kemiskinan**.

Persentase penduduk miskin Kabupaten Rote Ndao terhitung sejak tahun 2019-2023 mengalami penurunan namun belum signifikan, tahun 2019 menurun sebesar 0,13 persen, dan tahun 2020 menurun sebesar 0,41 persen, namun tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 0,54 persen dan pada tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 0,63 persen, tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 0,40 persen. Upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Rote Ndao perlu mendapatkan perhatian serius dari Pemerintah dan seluruh stakeholder melalui strategi intervensi program dan kegiatan yang terintegrasi sesuai dengan lokus penerima manfaat masyarakat miskin *by name by address*. Adapun perkembangan kemiskinan di Kabupaten Rote Ndao sejak tahun 2019-2023 dapat dilihat pada gambar 3.1, 3.2 dan 3.3 berikut:

Gambar 3.1

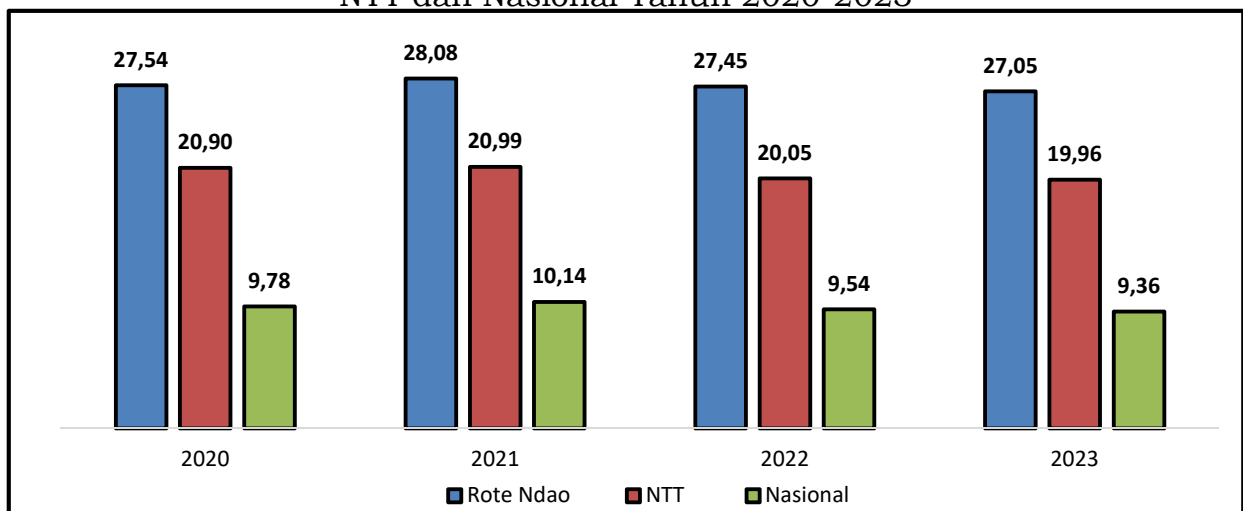
Perkembangan Antar Waktu Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2023



Sumber Data : BPS Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2023

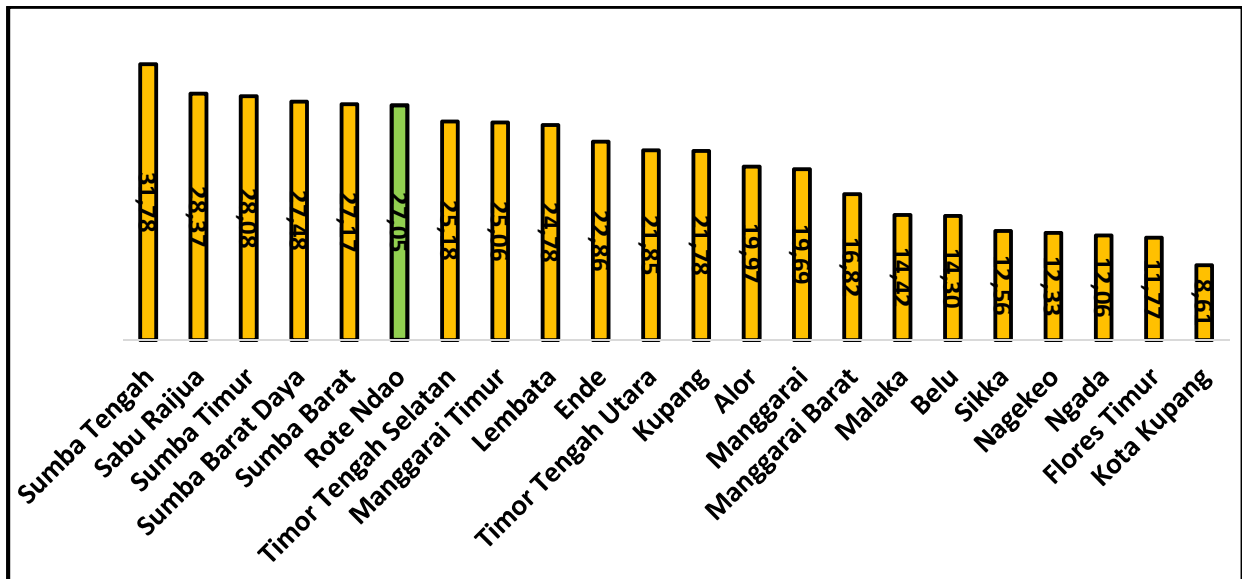
Gambar 3.2

Relevansi Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Rote Ndao, Provinsi NTT dan Nasional Tahun 2020-2023



Sumber : BPS Tahun 2018-2021 & Kemiskinan Kab/Kota Tahun 2023

Gambar 3.3
Perbandingan penduduk miskin Kabupaten Rote Ndao dan Kabupaten/Kota lainnya di NTT Tahun 2023:



Sumber : BPS (Kemiskinan Kab/Kota Tahun 2023)

Berdasarkan data pada gambar 3.3 Perbandingan penduduk miskin Kabupaten Rote Ndao dan Kabupaten/Kota lainnya di NTT pada Tahun 2023 dapat dijelaskan bahwa Kabupaten Rote Ndao persentase penduduk miskin berada pada urutan ke-6 (enam), masih tergolong cukup tinggi dibandingkan dengan kabupaten/kota lain. Oleh karena itu dibutuhkan intensitas kerja yang serius dari Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao bekerjasama dengan semua *stakeholder* yang berkepentingan untuk dapat menurunkan angka kemiskinan melalui intervensi program dan kegiatan yang tepat sasaran baik lokasi maupun penerima program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan sehingga disparitas kemiskinan yang terjadi bisa minimalisir.

Provinsi NTT merupakan salah satu contoh daerah yang masih menghadapi permasalahan yang kompleks terkait kemiskinan dan penanggulangan kemiskinan, masih tingginya angka kemiskinan disetiap Kabupaten/kota di Provinsi NTT, menyebabkan secara akumulatif Provinsi ini berada pada posisi terbawah tingkat kemiskinan tinggi dibandingkan Provinsi lain di Indonesia. Kondisi alam di Provinsi NTT tandus dan gersang,

kekeringan, rawan pangan menjadi permasalahan rutin warga NTT. Kemiskinan, kasus stunting, angka putus sekolah, serta akses fasilitas kesehatan yang kurang memadai menjadi mata rantai lanjutan dari persoalan kemiskinan. Provinsi NTT memiliki Sumber Daya Alam (SDA) yang cukup potensial dan beragam, namun sampai saat ini belum dikelola secara maksimal sehingga dapat memberikan nilai tambah yang signifikan bagi peningkatan perekonomian masyarakat agar lebih sejahtera, adil dan merata. Oleh karena itu langkah-langkah strategis ini harus dapat dilakukan secara cepat, tepat dan efisien yaitu dengan memberikan akses investasi yang lebih mudah namun memperhatikan rambu-rambu atau koridor hukum yang berlaku sehingga tidak menyebabkan kerugian kepada masyarakat, lingkungan atau negara sebagai institusi formal. Melalui penerapan kebijakan Otonomi Daerah yang tertuang secara jelas dalam peraturan Perundang-Undangan memberikan kewenangan kepada daerah untuk dapat memaksimalkan pengelolaan potensi yang ada di masing-masing Daerah sehingga dapat bermanfaat bagi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat banyak. Dalam pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah tidak hanya melaksanakan program pembangunan tetapi juga bertanggung jawab secara langsung dan aktif dalam penanggulangan kemiskinan dengan mengkaji faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kemiskinan, lokasi yang tepat sasaran, rumah tangga yang miskin secara mendetail dan formula yang cocok untuk penanggulangan kemiskinan tersebut.

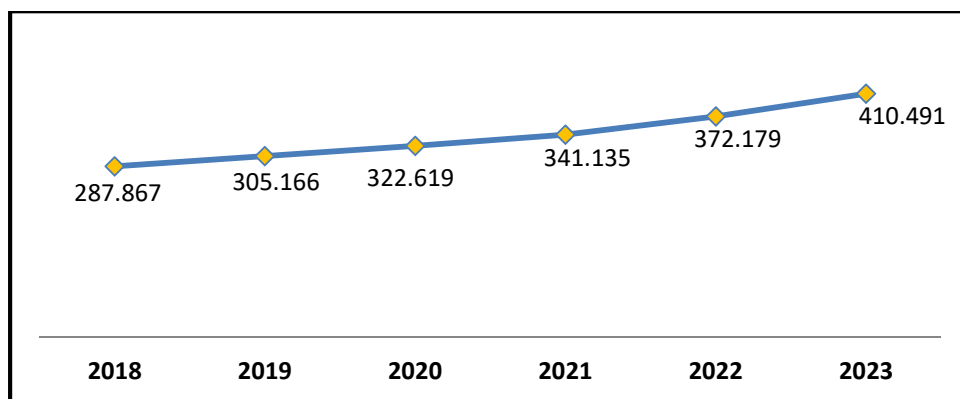
3.2 Garis Kemiskinan

Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori perkapita perhari. Paket komoditi

kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi yaitu padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dan lain-lain.

Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan. Berikut Perkembangan Antar Waktu Garis Kemiskinan Kabupaten Rote Ndao tahun 2018-2023 dapat dilihat pada gambar 3.4:

Gambar 3.4
Perkembangan Antar Waktu Garis Kemiskinan Kabupaten Rote Ndao Tahun 2018-2023:

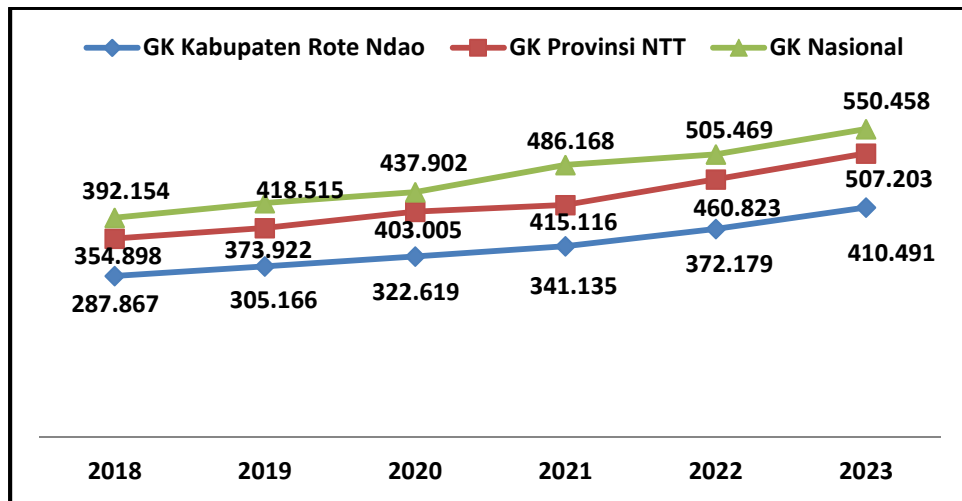


Sumber : BPS Tahun 2018-2023 & Kemiskinan Kab/Kota Tahun 2023

Garis Kemiskinan di Kabupaten Rote Ndao pada tahun 2018 sebesar Rp. 287.867, terus mengalami peningkatan hingga tahun 2023 sebesar Rp. 410.491 atau meningkat sebesar Rp. 122.624 selama 6 tahun.

Analisis Relevansi Garis Kemiskinan Kabupaten Rote Ndao dibandingkan dengan garis kemiskinan Provinsi dan Nasional pada tahun 2018-2023 :

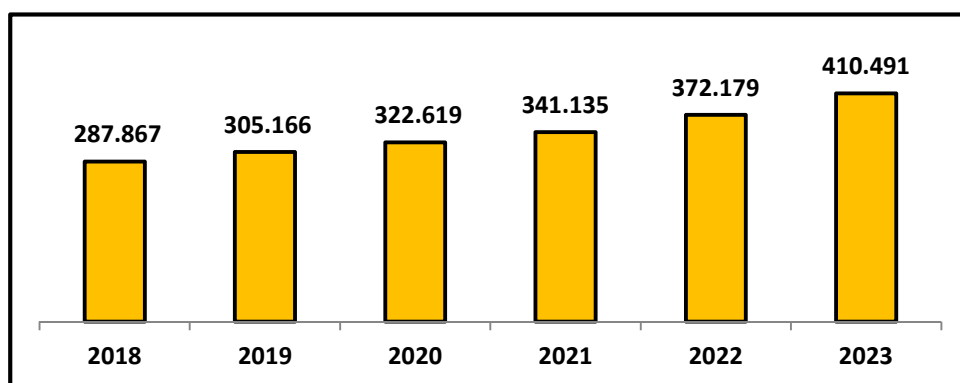
Gambar 3.5 Relevansi Garis Kemiskinan Kabupaten Rote Ndao Tahun 2018-2023



Sumber : BPS Tahun 2018-2023 & Kemiskinan Kab/Kota Tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas garis kemiskinan Kabupaten Rote Ndao, Provinsi NTT dan Nasional nilainya berbeda karena mencerminkan nilai rupiah pengeluaran minimum yang diperoleh seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokoknya selama sebulan, baik kebutuhan makanan maupun non makanan, Kabupaten Rote Ndao berada di bawah garis kemiskinan Provinsi dan Nasional.

Gambar 3.6 Efektivitas Garis Kemiskinan Kabupaten Rote Ndao Tahun 2018-2023



Sumber : BPS Tahun 2018-2023 & Kemiskinan Kab/Kota Tahun 2023

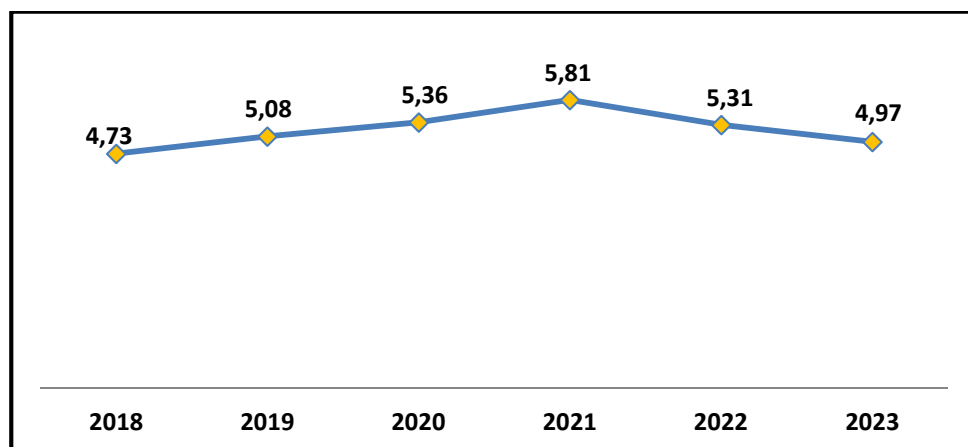
Perkembangan Garis Kemiskinan berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan, oleh karena itu perlu ada integrasi program/kegiatan yang mendukung penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Rote Ndao.

3.3 Indeks Kedalaman Kemiskinan

Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index-P1*), merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan.

Berikut Perkembangan Antar Waktu Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Rote Ndao tahun 2018-2023 dapat dilihat pada gambar 3.7:

Gambar 3.7
Perkembangan Antar Waktu Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Rote Ndao tahun 2018-2023

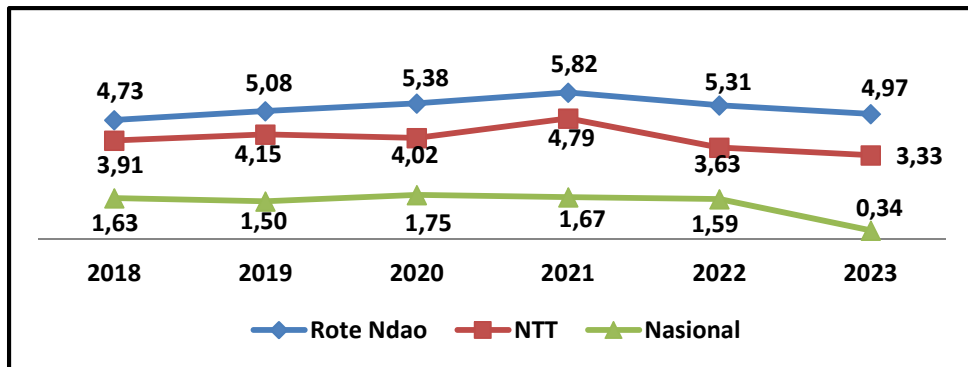


Sumber : BPS Tahun 2018-2023 & Kemiskinan Kab/Kota Tahun 2023

Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Rote Ndao mengalami fluktuasi sejak tahun 2018 sebesar 4,73 persen, kemudian meningkat pada tahun 2021 sebesar 5,82 persen dan pada tahun 2023 menurun 4,97 persen.

Relevansi Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Rote Ndao Tahun 2018-2023 dapat dilihat pada gambar 3.8 berikut :

Gambar 3.8
Relevansi Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Rote Ndao
Tahun 2018-2023

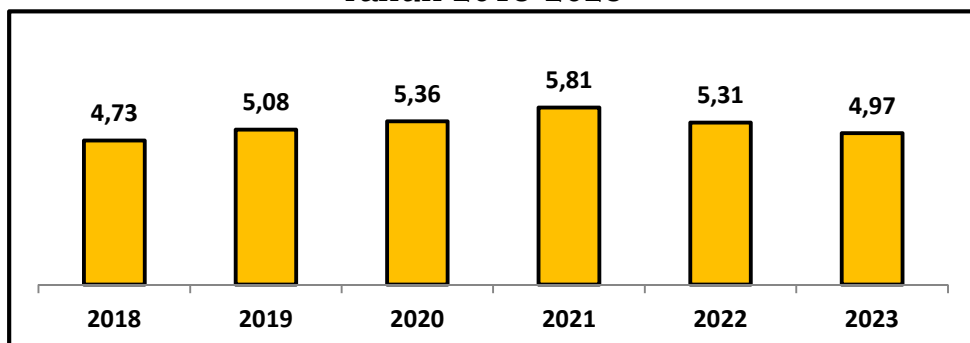


Sumber Data : BPS Kab.Rote Ndao, Provinsi dan Nasional Tahun 2018-2023

Pada gambar 3.8 di atas menunjukkan relevansi pola perubahan dari tahun ke tahun dengan capaian Provinsi NTT dan Nasional. Pola perubahan capaian Indeks Kedalaman Kemiskinan di Kabupaten Rote Ndao menunjukkan trend yang fluktuatif dari tahun 2018-2023, namun pola perubahannya sama sehingga indeks kedalaman ketiga capaian tersebut menunjukkan pola perubahan yang relevan antara Kabupaten Rote Ndao, Provinsi NTT dan Nasional.

Efektivitas Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Rote Ndao Tahun 2018-2023 dapat dilihat pada gambar 3.9:

Gambar 3.9
Efektivitas Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Rote Ndao
Tahun 2018-2023



Sumber : BPS Tahun 2018-2023 & Kemiskinan Kab/Kota Tahun 2023

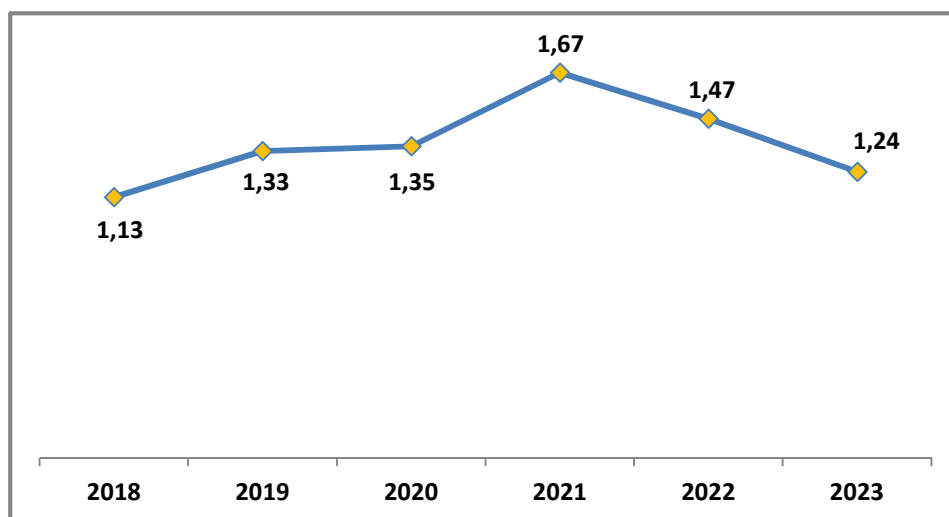
Pada gambar 3.9 di atas menunjukkan perubahan indeks kedalaman kemiskinan yang cenderung fluktuatif, hal ini menjelaskan bahwa program penanggulangan kemiskinan yang diselenggarakan sejak tahun 2018 dalam upaya menurunkan kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan di Kabupaten Rote Ndao belum memberikan dampak yang cukup signifikan, sehingga disimpulkan program-program penanggulangan kemiskinan belum efektif menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Rote Ndao.

3.4 Indeks Keparahan Kemiskinan

Indeks Keparahan Kemiskinan (*Proverty Severity Index-P2*) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.

Berikut Perkembangan Antar Waktu Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Rote Ndao tahun 2018-2023 dapat dilihat pada gambar 3.10:

Gambar 3.10
Perkembangan Antar Waktu Indeks Keparahan Kemiskinan
Kabupaten Rote Ndao tahun 2018-2023



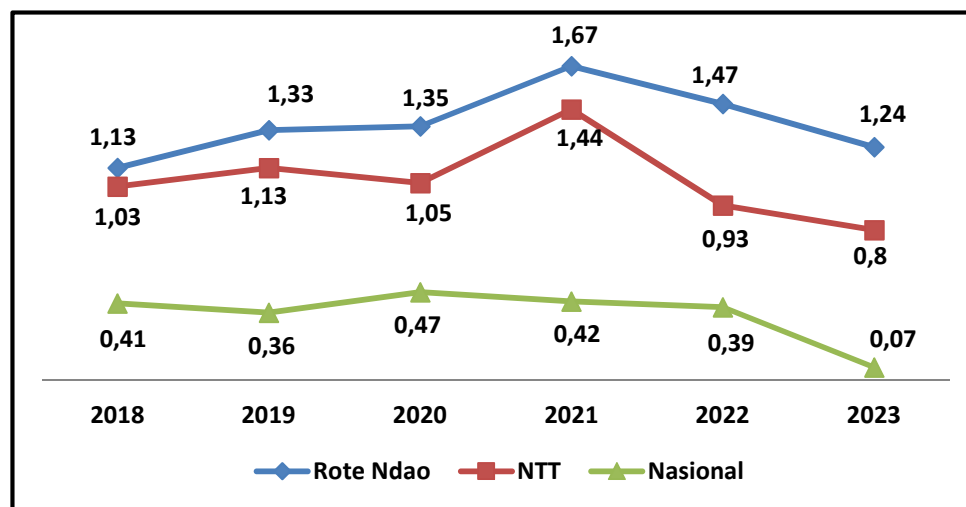
Sumber : BPS Tahun 2018-2023 & Kemiskinan Kab/Kota Tahun 2023

Indeks Keparahan Kemiskinan mengalami fluktuasi sejak tahun 2018-2023. Khusus tahun 2021 sampai tahun 2023 mengalami penurunan dari 1,67 persen menjadi 1,24 persen

Relevansi Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Rote Ndao Tahun 2018-2023 dapat dilihat pada gambar 3.11 berikut:

Gambar 3.11

Relevansi Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Rote Ndao Tahun 2018-2023

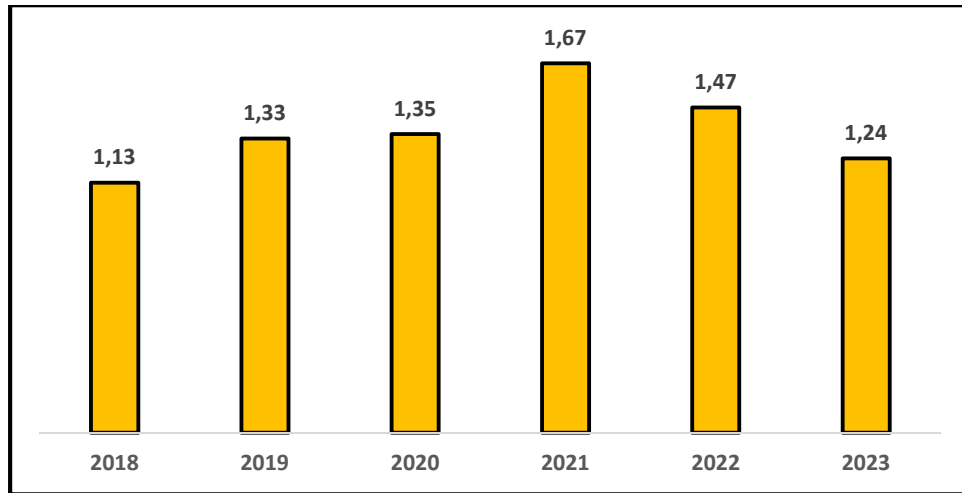


Sumber : BPS Tahun 2018-2023 & Kemiskinan Kab/Kota Tahun 2023

Pada gambar 3.11 di atas menunjukkan perbedaan pola perubahan dari tahun ke tahun dengan capaian Provinsi NTT dan Nasional. Pola perubahan capaian Indeks Kedalaman Kemiskinan di Kabupaten Rote Ndao menunjukkan trend yang fluktuatif dari tahun 2018-2023, pola perubahannya tidak sama, sehingga indeks kedalaman ketiga capaian tersebut menunjukkan pola perubahan yang tidak relevan antara Kabupaten Rote Ndao, Provinsi NTT dan Nasional.

Efektivitas Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Rote Ndao Tahun 2018-2023 dapat dilihat pada gambar 3.12:

Gambar 3.12
Efektivitas Indeks Keparahane Kemiskinan Kabupaten Rote Ndao
Tahun 2018-2023



Sumber Data : BPS Kabupaten Rote Ndao Tahun 2018-2023 & Kemiskinan Kab/Kota Tahun 2023

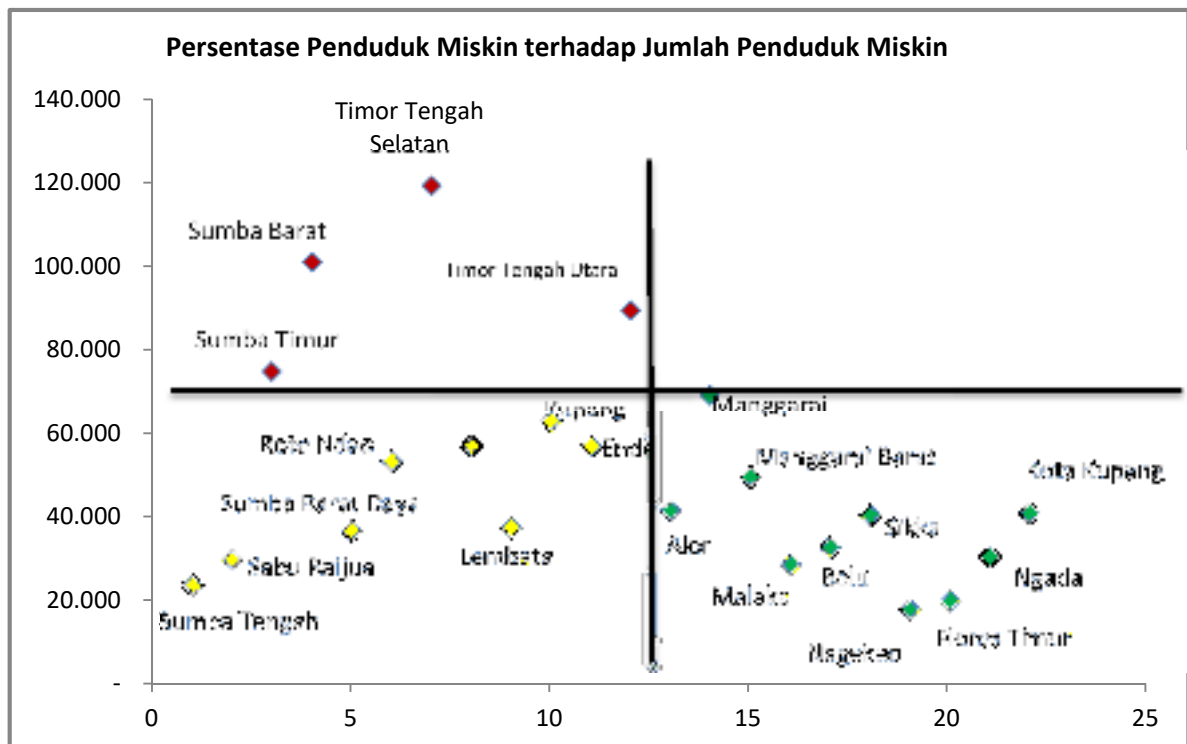
Gambar 3.12 di atas menunjukkan bahwa indeks keparahan kemiskinan cenderung mengalami penurunan namun fluktuatif, hal ini dibarengi dengan pandemi covid-19 yang melanda dunia dan konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina menyebabkan pasokan bahan pangan dunia mengalami kelangkaan sehingga terjadi inflasi, Kabupaten Rote Ndao juga mengalami efek ketidakstabilan yang melanda dunia saat ini. Hal lain juga dapat dijelaskan bahwa program penanggulangan kemiskinan yang diselenggarakan sejak tahun 2018 dalam upaya menurunkan kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan di Kabupaten Rote Ndao belum memberikan dampak yang cukup signifikan, sehingga disimpulkan program-program penanggulangan kemiskinan belum efektif menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Rote Ndao.

Untuk melihat lebih jauh lagi kondisi kemiskinan di Kabupaten Rote Ndao masih bisa dilakukan analisis lebih lanjut. Analisis selanjutnya adalah analisis Prioritas Wilayah, analisis ini bisa memperlihatkan posisi Kabupaten Rote Ndao dalam kuadran prioritas wilayah dibandingkan dengan

Kabupaten/Kota lain di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Titik berwarna merah menunjukkan posisi wilayah Prioritas 1, titik berwarna kuning menunjukkan posisi wilayah Prioritas 2, titik berwarna hijau menunjukkan posisi wilayah prioritas 3, Selanjutnya dapat dilihat dalam gambar 3.13 sampai 3.14 di bawah ini.

Gambar 3.13

Analisis Prioritas Wilayah Capaian Indikator Persentase Penduduk Miskin terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Rote Ndao Tahun 2023

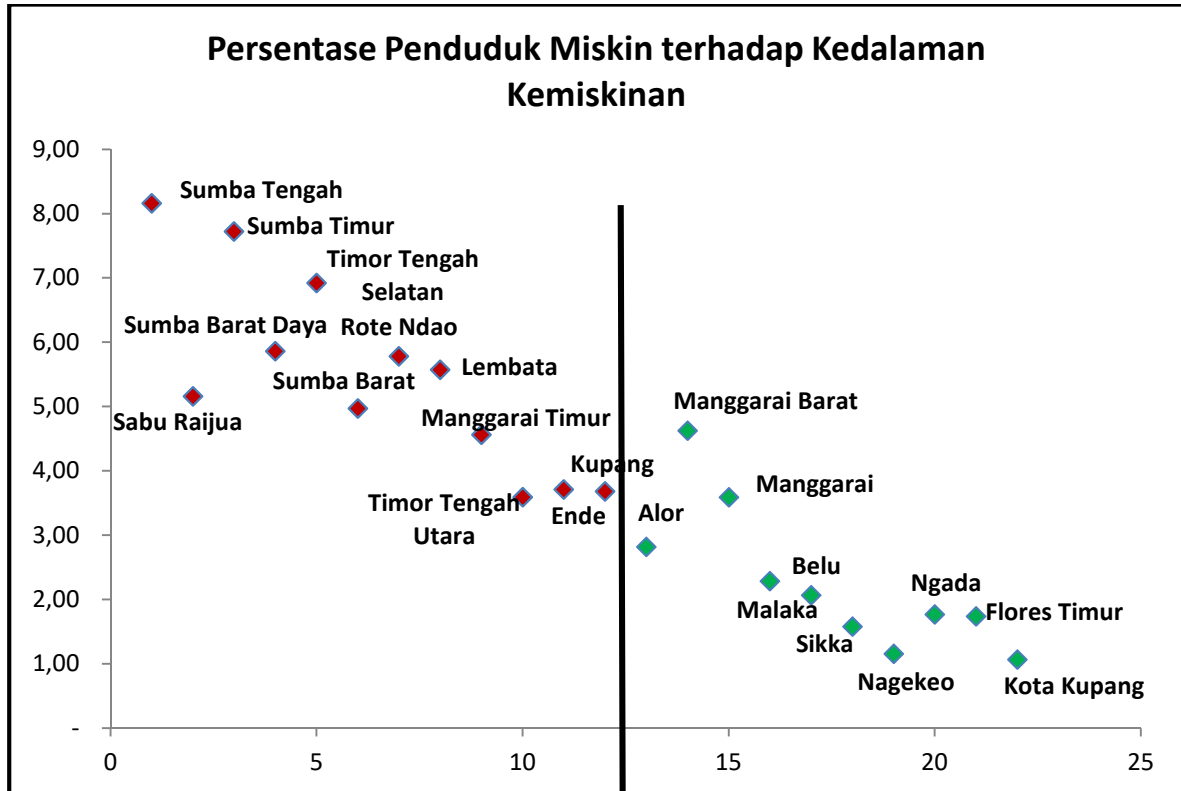


Sumber : BPS (Kemiskinan Kab/Kota Tahun 2023)

Pada gambar 3.13 di atas dijabarkan Kabupaten Rote Ndao berada pada prioritas kedua dengan persentase penduduk miskin 27,05 atau berjumlah 52.550 jiwa miskin, hal ini berarti capaian tersebut **Sudah Cukup Baik** jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur

Gambar 3.14

Analisis Prioritas Wilayah Capaian Indikator Persentase Penduduk Miskin terhadap Indeks Kedalaman Kemiskinan di Kabupaten Rote Ndao Tahun 2023

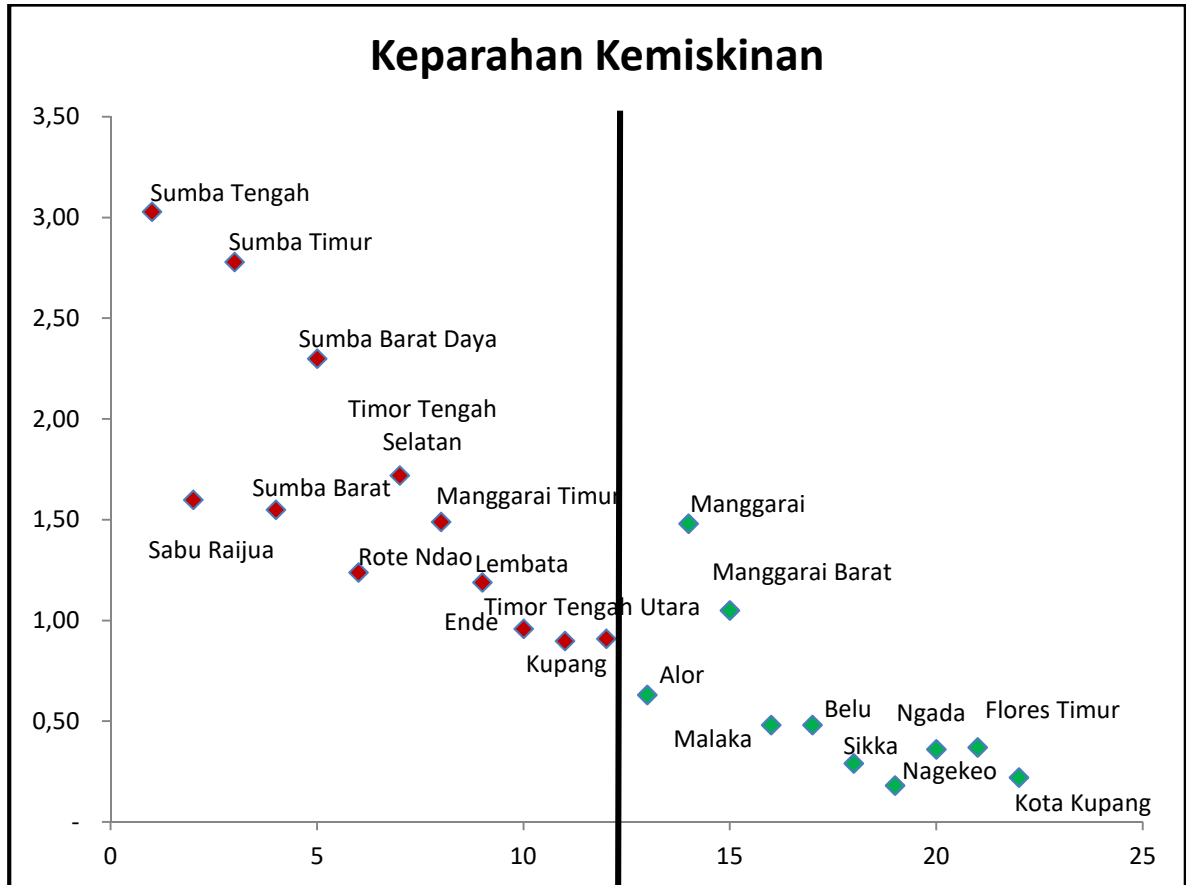


Sumber : BPS (Kemiskinan Kab/Kota Tahun 2023).

Pada gambar 3.14 di atas dapat dijabarkan Kabupaten Rote Ndao berada pada prioritas kedua dengan indeks kedalaman kemiskinan 5,31 persen pada tahun 2023, hal ini berarti capaian tersebut **Perlu Ada Upaya Yang Intensif** jika dibandingkan dengan capaian Kabupaten/kota lain di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Gambar 3.15

Analisis Prioritas Wilayah Capaian Indikator Persentase Penduduk Miskin terhadap Indeks Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Rote Ndao Tahun 2023 :



Sumber : BPS (Kemiskinan Kab/Kota Tahun 2023).

Pada gambar 3.15 di atas dapat dijabarkan Rote Ndao berada pada prioritas kedua dengan indeks kedalaman kemiskinan 1,24 persen pada tahun 2023, hal ini berarti capaian tersebut **Perlu Ada Upaya Yang Intensif** jika dibandingkan dengan capaian Kabupaten/kota lain di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

3.5 Program Penanggulangan Kemiskinan

Pemerintah Kabupaten Rote Ndao terus berupaya melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan melalui berbagai program kegiatan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Rote Ndao. Program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, antara lain :

- a) Dinas Perikanan
- b) Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
- c) Dinas Pertanian
- d) Dinas Peternakan
- e) Dinas PMD
- f) Dinas Koperindag
- g) Dinas Sosial
- h) Dinas PKPLH
- i) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
- j) Dinas PUPR
- k) Dinas PKO
- l) Dinas Kesehatan
- m) Dinas P3AP2KB

Berbagai kebijakan diambil dalam upaya meminimalisir beban penduduk miskin yang diimplementasikan dalam pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana pada Tabel 3.1 berikut:

TABEL 3.1
ANGGARAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DALAM APBD KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2024

No	Nama OPD	Sasaran OPD	Nama Program	Nama Kegiatan	Kode Sub	Nama Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8
MENINGKATKAN PENDAPATAN							
1	Dinas Perikanan	Meningkatnya produksi Kelauatan dan perikanan					
			Program Pengelolaan Perikanan Tangkap				
				Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat, DiUsahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	3.25.03.2.01.02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	2.456.839.900
			Program Pengelolaan Perikanan Budidaya				
				Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil	3.25.04.2.02.04	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	187.500.000
				Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	3.25.04.2.04.02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	436.163.000
				Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	3.25.04.2.04.03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.884.836.800
			Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan				

No	Nama OPD	Sasaran OPD	Nama Program	Nama Kegiatan	Kode Sub	Nama Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8
				Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah	3.25.06.2.03.02	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	232.058.000
2	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Meningkatnya Ketrampilan /Kompetensi Tenaga Kerja					
		Meningkatnya pembinaan Transmigran lokal					
			Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi			
					2.07.03.2.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	294.292.405
			Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian			
					2.32.04.2.01.01	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	133.842.970

No	Nama OPD	Sasaran OPD	Nama Program	Nama Kegiatan	Kode Sub	Nama Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Dinas Pertanian	Meningkatnya produksi dan produktivitas komoditi pertanian, perkebunan dan perikanan untuk mencapai kedaulatan pangan					
		Meningkatnya ketersediaan, akses dan pemanfaatan pangan					
			Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pembangunan Prasarana Pertanian	3.27.03.2.02.01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	7.664.204.000
					3.27.03.2.02.03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	2.185.796.000
					3.27.03.2.02.09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	3.500.000.000
			Penyuluhan Pertanian	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	3.27.07.2.01.01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	175.000.000
					3.27.07.2.01.02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	100.000.000
			Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian				
				Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	1.953.086.000

No	Nama OPD	Sasaran OPD	Nama Program	Nama Kegiatan	Kode Sub	Nama Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8
				Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	3.27.02.2.02.0004	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman	125.945.000
				Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	3.27.02.2.02.0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	470.506.000
				Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	3.27.02.2.02.0003	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	212.524.450
			Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	2.09.03.2.01.02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	75.000.000
					2.09.03.2.01.10	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota	25.000.000
					2.09.03.2.01.11	Pemantauan Stok Pangan	50.000.000
				Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	585.000.000
			Penanganan Kerawanan Pangan	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	2.09.04.2.01.01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	15.000.000

No	Nama OPD	Sasaran OPD	Nama Program	Nama Kegiatan	Kode Sub	Nama Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8
				Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	2.09.04.2.02.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	60.000.000
			Pengawasan Keamanan Pangan	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	2.09.05.2.01.01	Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	75.000.000
4	Dinas Peternakan	Meningkatnya Populasi Ternak					
			Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian				
				Pengelolaan SDG Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	3.27.02.2.02.03	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	944.000.000
				Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.27.02.2.03.01	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	60.000.000
				Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.27.02.2.05.09	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	40.000.000
			program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian				
				Pembangunan Prasarana Pertanian	3.27.03.2.02.09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	4.400.000.000

No	Nama OPD	Sasaran OPD	Nama Program	Nama Kegiatan	Kode Sub	Nama Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8
			Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner				
				Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.27.04.2.01.0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	579.000.000
				Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.27.04.2.03.0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	1.715.175.000
				Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	3.27.04.2.04.0002	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	5.000.000
			Program Perizinan Usaha Pertanian				
				Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	3.27.06.2.02.0002	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan	100.862.000
5	Dinas PMD	Meningkatnya transparansi dan responsibilitas pelayanan publik					
			Program Administrasi Pemerintah Desa	Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDESA dan Lembaga Kerjasama Antar Desa	2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDESA dan Lembaga Kerjasama Antar Desa	30.000.000

No	Nama OPD	Sasaran OPD	Nama Program	Nama Kegiatan	Kode Sub	Nama Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8
MENURUNKAN BEBAN PENGELUARAN							
6	Dinas Koperindag	Meningkatnya kontribusi dan daya saing peran Koperasi UMKM, perindustrian dan Perdagangan					
		Meningkatnya kontribusi dan daya saing peran Koperasi UMKM, perindustrian dan Perdagangan					
			Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	3.30.06.2.01.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	18.059.600
				Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	3.31.02.2.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	554.500.000
			Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi Yang Wilayah Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.17.03.2.01 .0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	10.000.000
			Program Pengembangan UMKM	Pengembangan Usaha Mikro Dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Kecil	2.17.08.2.01.0006	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	393.584.000
7	Dinas Sosial	Meningkatnya pemberdayaan dan akses pelayanan sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)					

No	Nama OPD	Sasaran OPD	Nama Program	Nama Kegiatan	Kode Sub	Nama Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8
			Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti sosial	1.06.04.2.02.07	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis dan masyarakat	20.000.000
			Program Perlindungan dan Jaminan Sosial				
				Pengelolaan Data Fakir miskin cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1.06.05.2.02.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin cakupan Daerah Kabupaten/Kota	87.658.000
			Program Penanganan Bencana				
				Perlindungan Sosial Korban Bencana dan Sosial Kabupaten/Kota	1.06.06.2.01.01	Penyediaan Makanan	275.053.000
8	Dinas PKPLH	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat					
		Meningkatnya Kualitas Sampah					
			Program Pengembangan Perumahan	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/kota	1.04.02.2.03	Rehabilitasi Rumah Korban Bencana	95.200.000
			Program Pengelolaan Persampahan	Pengelolaan Sampah	2.11.11.2.01.0012	Penamngan sampah melalui Penangkutan	1.062.658.000
9	Badan Penanggulangan Bencanan Daerah (BPBD)	Meningkatnya Pengelolaan Manajemen dan Penanganan Bencana					
			Program Penanggulangan Bencana	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	05.03.2.02.0016	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/ Kota	485.000.000

No	Nama OPD	Sasaran OPD	Nama Program	Nama Kegiatan	Kode Sub	Nama Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8
					05.03.2.02.0017	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/ Kota	61.230.000
				Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	05.03.2.03.0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/ Kota	100.520.000
					05.03.2.03.0010	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/ Wabah Penyakit	220.000.000
					05.03.2.03.0011	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	50.000.000
MEMINIMALKAN WILAYAH KANTONG KEMISKINAN							
10	Dinas PUPR	Meningkatnya Infrastruktur irigasi dan sumber daya air					
		Meningkatkan ketersediaan infrastruktur air limbah dan air minum					
		Meningkatnya infrastruktur jalan antar wilayah					
			Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.2.01.0114	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	442.000.000
				Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.2.02.0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	2.341.983.000

No	Nama OPD	Sasaran OPD	Nama Program	Nama Kegiatan	Kode Sub	Nama Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8
				Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.2.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	4.111.915.000
				Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.2.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	236.098.000
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	1.03.03.2.01.28	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	5.835.781.000
					1.03.03.2.01.32	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	656.616.000
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.03.05.2.01.0039	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik SPALD Setempat	5.716.654.000
			Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	1.03.10.2.02.0033	Rekonstruksi Jalan	50.123.288.040
				Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	1.03.10.2.02.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembata	390.874.750
				Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	1.03.10.2.02.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan	100.000.000

No	Nama OPD	Sasaran OPD	Nama Program	Nama Kegiatan	Kode Sub	Nama Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8
11	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga	Meningkatnya akses layanan pendidikan masyarakat					
		Meningkatnya prestasi olahraga dan peran serta kepemudaan dalam pembangunan					
			Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.2.01.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	838.000.000,00
					1.01.02.2.01.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	790.000.000,00
					1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah	794.440.000,00
					1.01.02.2.01.0007	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	1.015.000.000,00
					1.01.02.2.01.0009	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	213.001.000,00
					1.01.02.2.01.0011	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	154.775.000,00
					1.01.02.2.01.0016	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	289.800.000,00
					1.01.02.2.01.0022	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	100.000.000,00
					1.01.02.2.01.0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	7.912.500.000,00
					1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	1.079.750.000,00
					1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	46.741.400,00
					1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	17.893.696.000,00
					1.01.02.2.01.0031	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	1.632.389.000,00
					1.01.02.2.01.0037	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	35.000.000,00

No	Nama OPD	Sasaran OPD	Nama Program	Nama Kegiatan	Kode Sub	Nama Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8
					1.01.02.2.01.0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	650.000.000,00
					1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru	2.132.800.000,00
					1.01.02.2.01.0049	Bimbingan Teknis Pelatihan dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	200.000.000,00
					1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	6.751.305.435,00
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.01.02.2.02.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	790.000.000,00
					1.01.02.2.02.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	489.600.000,00
					1.01.02.2.02.0006	Pembangunan Laboratorium	1.897.073.000,00
					1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	2.284.236.000,00
					1.01.02.2.02.0017	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	328.419.000,00
					1.01.02.2.02.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah	140.859.000,00
					1.01.02.2.02.0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	133.730.000,00
					1.01.02.2.02.0035	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	225.000.000,00
					1.01.02.2.02.0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	594.699.100,00
					1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	111.780.000,00
					1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	11.034.320.000,00
					1.01.02.2.02.0050	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	35.000.000,00
					1.01.02.2.02.0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru	1.095.000.000,00
					1.01.02.2.02.0060	Bimbingan Teknis Pelatihan dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	123.389.000,00
					1.01.02.2.02.0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	650.000.000,00

No	Nama OPD	Sasaran OPD	Nama Program	Nama Kegiatan	Kode Sub	Nama Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8
					1.01.02.2.02.0064	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	447.400.000,00
				Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas PAUD	126.940.000,00
					1.01.02.2.03.0009	Pengadaan Perlengkapan PAUD	180.000.000,00
					1.01.02.2.03.0013	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	50.000.000,00
					1.01.02.2.03.0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	981.000.000,00
					1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	66.500.000,00
					1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	204.160.000,00
					1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	2.254.200.000,00
					1.01.02.2.03.0030	Pembangunan Ruang Kelas Baru	1.835.928.484,00
					1.01.02.2.03.0039	Bimbingan Teknis Pelatihan dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	273.404.000,00
			Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Penyadaran Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota Wirausaha Muda Pemula dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	2.19.02.2.01.0003	Koordinasi Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	4.701.592.000,00
12	Dinas Kesehatan	Meningkatnya Ketersediaan dan Mutu Fasilitas Pelayanan Kesehatan					
			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upayaj Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Kabupaten/Kota	1.02.02.2.01.0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	2.715.702.827

No	Nama OPD	Sasaran OPD	Nama Program	Nama Kegiatan	Kode Sub	Nama Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8
					1.02.02.2.01.0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	1.114.854.500
					1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	260.000.000
					1.02.02.2.01.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	9.062.880.043
					1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	4.014.349.594
					1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit	3.001.303.470
					1.02.02.2.01.0022	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	4.141.160.600
					1.02.02.2.01.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	4.228.883.300,00
13	Dinas P3AP2KB	Meningkatnya kualitas dan akseibilitas pelayanan KB, ketahanan keluarga dan					
			Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	2.14.03 .2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	1.055.266.000
					2.14.03 .2.03.0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	1.017.975.000

No	Nama OPD	Sasaran OPD	Nama Program	Nama Kegiatan	Kode Sub	Nama Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8
				Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	2.14.03 .2.03.0006	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	200.000.000
TOTAL							208.556.106.668

BAB IV

PENUTUP

Dokumen Rencana Aksi Tahunan (RAT) Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2024 di Kabupaten Rote Ndao, merupakan salah satu bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Rote Ndao dalam mendukung pelaksanaan kebijakan pemerintah pusat untuk percepatan Penanggulangan kemiskinan.

Dokumen ini memiliki peran penting dalam mendukung pencapaian target pembangunan untuk penanggulangan kemiskinan sebagaimana diamanatkan dalam komitmen global yang tertuang dalam *Sustainable Development Goal's* (SDG's), serta arahan perencanaan nasional (RPJPN dan RPJMN) dan arahan perencanaan pembangunan di tingkat daerah Kabupaten dan Provinsi (RPJPD dan RPD).

4.1 Kesimpulan

Dokumen Rencana Aksi Tahunan (RAT) Penanggulangan kemiskinan ini dibuat untuk mengintegrasikan program dan kegiatan serta lokasi prioritas yang tersebar di beberapa Perangkat Daerah dalam upaya Percepatan Penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Rote Ndao.

4.2 Saran

Perlu adanya komitmen dari semua pihak untuk mendukung pelaksanaan sinergitas program-program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Rote Ndao agar target pencapaian kemiskinan yang sudah direncanakan dapat tercapai.